

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

A. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka dalam penelitian ini dilakukan untuk memberi gambaran mengenai penelitian-penelitian terdahulu tentang *Community-Based Natural Resource Management* (CBNRM) dan Hutan Kemasyarakatan, serta memberikan penjelasan bahwa apa yang diteliti dalam penelitian ini memiliki nilai kebaruan. Tinjauan pustaka dilakukan dengan menelaah beberapa artikel jurnal dan karya ilmiah hasil penelitian-penelitian terdahulu yang dipublikasikan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Tinjauan pustaka disini memaparkan telaah terhadap dua garis besar topik penelitian yaitu Hutan Kemasyarakatan dan *Community-Based Natural Resource Management* (CBNRM)

Penelitian terkait dengan urgensi HKm telah dilaksanakan oleh Purnomo dan Anand (2014). Penelitian tersebut menggambarkan bahwa pengelolaan hutan di Indonesia masih belum terlaksana dengan baik dan sistematis. Akibat pemerintah lebih mendukung industri dan kebutuhan pasar, pemerintah justru kehilangan sumber pendapatan yang diharapkan dari pengelolaan hutan yang benar dan kehilangan keanekaragaman (*biodiversity*) hutan. Penelitian ini menjelaskan bahwa HKm adalah upaya yang mampu menyelesaikan masalah tersebut. HKm menjadi program untuk mendistribusi dan mengalokasikan kembali hasil hutan sekaligus menyelamatkan lingkungan dan memberdayakan masyarakat sekitar.

Perkembangan penelitian terkait HKm, telah sampai ke ranah studi implementasi hingga evaluasi. Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan implementasi Hutan Kemasyarakatan (HKm) dilakukan oleh Kaskoyo et al (2014), yang meneliti tentang implementasi HKm di dua wilayah HKm di Provinsi Lampung. Data dikumpulkan dengan mengeksplorasi empat aspek, yaitu: formasi petani, pengelolaan hutan dibawah skema HKm, motivasi petani untuk berpartisipasi di dalam program HKm, dan persepsi petani mengenai peran mereka dalam program HKm.

Meskipun dominasi dalam penelitian tersebut adalah mengenai implementasi HKm, tetapi penelitian tersebut juga memaparkan tentang kondisi sosioekonomis dan vegetasi di dua HKm yang menjadi obyek penelitian. Kondisi sosioekonomis yang dimaksud dalam penelitian tersebut adalah data mengenai petani-petani yang mengelola HKm. Data yang dimaksud adalah data usia, etnik, pendidikan formal dan/atau informal, dan pendapatan per bulan. Sedangkan data mengenai vegetasi digunakan untuk mengetahui komoditas milik petani yang ada di dua HKm tersebut.

Penelitian di atas menyimpulkan bahwa program HKm di dua kabupaten di Provinsi Lampung tersebut masih belum optimal sebagaimana yang diharapkan. Hal ini dikarenakan beberapa kendala, diantaranya adalah perubahan regulasi mengenai HKm yang pasti berpengaruh kepada pengelolaan HKm. Selain itu, adapun kendala mengenai pengukuran dan pemetaan batas wilayah kerja, penanaman pemeliharaan dan keamanan, pembayaran royalti, dan pelaporan tahunan kepada pemerintah belum dapat dilaksanakan dengan baik. Penelitian ini

menggarisbawahi bahwa dalam pengelolaan HKm, masyarakat dalam hal ini petani hutan membutuhkan bantuan teknis yang berkaitan dengan manajemen perlindungan hutan dan juga kesempatan untuk pembiayaan.

Masih terkait dengan penerapan HKm, partisipasi masyarakat adalah salah satu hal yang penting. Firdha et.al (2014) melakukan penelitian terkait dengan partisipasi masyarakat dalam implementasi HKm. Penelitian yang dilaksanakan di salah satu kecamatan di Kabupaten Lombok Tengah tersebut menjabarkan bahwa partisipasi masyarakat tergolong tinggi untuk tahap sosialisasi, pembentukan kelompok tani, monitoring, dan evaluasi. Sedangkan dalam perumusan rencana dan pelaksanaan HKm masih tergolong sedang.

Tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan HKm adalah pada tahap sosialisasi. Ternyata tahap sosialisasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keberhasilan pelaksanaan HKm. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Taufiqurrohman (2014), bahwa sosialisasi yang dilakukan dengan baik akan berdampak kepada keberhasilan implementasi HKm. Sehingga dapat diketahui bahwa partisipasi masyarakat yang tinggi dalam sosialisasi HKm dan didukung dengan pelaksanaan sosialisasi yang baik, maka skema HKm dapat sukses diimplementasikan.

Penelitian selanjutnya adalah tentang evaluasi pelaksanaan HKm. Penelitian mengenai evaluasi pengelolaan HKm di Pulau Lombok yang dilakukan oleh Nandini (2013). Penelitian tersebut menjadikan tiga HKm dengan dua jenis berbeda yakni hutan produksi dan hutan lindung sebagai obyek penelitian. Hasilnya menunjukkan bahwa kedua HKm tersebut masih berada di kondisi

“Sedang” dilihat dari hasil *scoring* dengan tiga aspek pembatas yakni: aspek ekonomi, aspek teknis, dan aspek kelembagaan.

Berdasarkan pembahasan mengenai setiap aspek pembatas dalam evaluasi pengelolaan HKm pada hutan lindung dan hutan produksi tersebut, diketahui bahwa masalah utama terletak pada keterbatasan terhadap dua hal, yaitu: kondisi biofisik dan kelemahan SDM pengelola. Kondisi biofisik dapat dibantu dengan sistem diversifikasi lahan. Sedangkan kelemahan SDM pengelola ini berkaitan dengan ketidakmampuan SDM mengelola potensi ekonomi untuk memperoleh dampak ekonomi yang baik, serta kelemahan kelembagaan yang diakibatkan karena keterbatasan kualitas SDM pengelola HKm. Sehingga penelitian tersebut menegaskan bahwa peran pendampingan dan pemberdayaan masih dibutuhkan oleh masyarakat pengelola HKm.

Penelitian di atas relevan dengan penelitian tentang *output* HKm oleh Winata et.al (2015) yang mengemukakan bahwa manfaat dari HKm bagi masyarakat yakni berupa pendapatan, dipengaruhi oleh luas lahan, penyuluhan, modal, dan pengalaman. Dimana tingkat pendapatan masyarakat dari hasil HKm dipengaruhi oleh adanya penyuluhan dan modal sehingga pendampingan dan pemberdayaan bagi pengelola HKm memang penting adanya. Pengalaman tanpa modal dan pemberdayaan dirasa masih belum optimal untuk mendorong peningkatan pendapatan dari HKm.

Penelitian tentang HKm juga berkembang dalam ranah gagasan pendorong penyelamatan lingkungan yang masih tetap memiliki potensi ekonomi. Penelitian yang dilakukan oleh Fitria et.al (2017) menunjukkan bahwa dengan

mengedepankan aspek lingkungan, petani-petani HKm dapat mendapatkan manfaat ekonomi yang tinggi dari pengelolaan HKm. Penelitian tersebut memaparkan bahwa berbagai tanaman HKm dapat menyimpan karbon, dimana karbon tersebut nantinya akan diperjualbelikan dengan mekanisme tertentu kepada negara-negara maju, salah satunya dengan skema *Voluntary Carbon Market (VCM)*.

Potensi tersebut menjadi salah satu bukti bahwa pengelolaan HKm memang bersifat berkelanjutan. Dampak yang diberikan juga akan terus-menerus dirasakan oleh para pengelola HKm. Sebagaimana dua penelitian sebelumnya di dalam tinjauan pustaka ini, dimana skema inisiatif karbon ini juga membutuhkan daya dukung yang masif dari pemerintah. Karena hal semacam ini memang perlu diatur dengan regulasi tertentu dan masyarakat membutuhkan pendampingan dari pemerintah.

Garis penghubung yang mengaitkan antara HKm dengan CBNRM salah satunya dapat dilihat dalam penelitian yang dilakukan oleh Williams (2016), yang menegaskan bahwa CBNRM dapat memberikan dampak cukup dalam terhadap lingkungan dan akses yang adil terhadap sumber daya lokal yang ada. Dimana masyarakat dapat membantu mengurangi degradasi lingkungan dan keterbelakangan masyarakat itu sendiri. Selaras dengan tujuan dan maksud HKm yang memberdayakan masyarakat sekaligus berupaya untuk menyelamatkan lingkungan termasuk kawasan hutan.

Penelitian mengenai CBNRM juga dilakukan oleh Pailler et.al (2015). Penelitian tersebut merupakan penelitian terhadap kondisi sosio-ekonomi di level

nasional, dimana obyek penelitiannya meliputi ratusan desa di negara Tanzania. Eksplorasi peneliti tidak hanya ke wilayah pedesaan yang mengimplementasikan CBNRM tetapi juga wilayah-wilayah yang tidak menerapkan CBNRM/Non-CBNRM.

Ada perbedaan signifikan dari wilayah CBNRM dengan wilayah CBNRM mengenai ketahanan pangan. Wilayah CBNRM memiliki ketahanan pangan yang lebih baik daripada wilayah Non-CBNRM. Akan tetapi pada aspek kesejahteraan dan kesehatan anak-anak, keduanya tidak jauh berbeda. Belum dapat ditemukan bahwa tata kelola CBNRM konsisten memberikan manfaat dengan meningkatkan nilai kesejahteraan rumah tangga secara konsisten, namun hal tersebut diprediksi karena pelaksanaan CBNRM yang belum berlangsung lama. Secara garis besar, penelitian tersebut menilai bahwa pelaksanaan CBNRM potensial untuk dilanjutkan demi masa depan pedesaan di Tanzania.

Penelitian CBNRM di level nasional juga telah dilakukan oleh Riehl et.al (2015), namun dilakukan di negara Namibia. Namibia memiliki program pengembangan CBNRM yang tersebar luas di seluruh Namibia. Sehingga penelitian tersebut menjadikannya sebagai obyek penelitian untuk mengetahui hubungan antara konservasi dan kesejahteraan sosial-ekonomi di masyarakat setempat. Program CBNRM di Namibia melibatkan konservasi komunal di masyarakat pedesaan. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa program CBNRM di Namibia memiliki dampak yang positif terhadap kesejahteraan rumah tangga, pencegahan malaria, dan efek negatif pada kehadiran sekolah.

Kedua penelitian CBNRM yang telah dijabarkan di atas berada di level nasional atau dalam ruang lingkup satu negara. Penelitian menunjukkan bahwa adanya CBNRM di masyarakat mampu membawa dampak positif terutama berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, CBNRM juga mampu menjadi salah satu upaya mendorong konservasi lingkungan atau sumber daya alam, selain menjadikan sumber daya alam sebagai mata pencaharian.

No	Identitas Jurnal/ Karya Tulis	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
1.	Kaskoyo, Hari., Mohamed, Abrar Johar, dan Inoue, Makoto. 2014. <i>Present State of Community Forestry (Hutan Kemasyarakatan/HKm) Program in a Protection Forest and Its Challenges: Case Study in Lampung Province, Indonesia</i> . Journal of Forest Science. Volume 30. Nomor 1. Hlm 15-29	Program HKm di dua lokasi penelitian tersebut tidak mencapai tujuannya terutama karena sering terjadi perubahan peraturan. Insentif utama bagi masyarakat lokal untuk berpartisipasi dalam program ini adalah mendapatkan sertifikat manajemen dan sebagai efektivitas program dalam meminimalkan konflik penggunaan lahan.	<p>Persamaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meneliti tentang pengelolaan HKm 2. Menjadikan petani hutan sebagai sumber data penelitian. <p>Perbedaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penelitian tersebut tidak menggunakan pendekatan CBM melainkan pendekatan HKm 2. Penelitian tersebut tidak memaparkan bagaimana kolaborasi dan jejaring para aktor dalam pengelolaan HKm, lebih berfokus kepada petani pengelola HKm.
2.	Purnomo, Eko Priyo dan Anand, P.B. 2014. <i>The Conflict of Forest Tenure and the Emergence of Community-Based Forest Management in Indonesia</i> . Journal of	Pemerintah kehilangan keberagaman hutan dan sumber pendapatan diakibatkan <i>mismanagement</i> hutan yang ada. Sehingga <i>Community-Based Forest Management (CBFM)</i>	<p>Persamaan:</p> <p>Meneliti tentang HKm</p> <p>Perbedaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penelitian ini berada di level nasional, bukan studi kasus. 2. Teknik yang digunakan adalah meta-analysis

	Government and Politics. Volume 5. Nomor 1. Hlm 20-31.	adalah kebijakan yang tepat untuk mengatasi masalah tersebut.	
3.	Nandini, Ryke. 2013. <i>Evaluasi Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (HKm) pada Hutan Produksi dan Hutan Lindung di Pulau Lombok</i> . Jurnal Penelitian Hutan Tanaman. Volume 10. Nomor 1. Hlm: 43-55.	Kondisi HKm dari hutan lindung maupun hutan produksi keduanya berada pada kondisi “Sedang”. Pada HKm dari hutan lindung dan hutan produksi, keduanya memiliki faktor pembatas kelembagaan berupa sistem pengelolaan kelembagaan. Sedangkan dari faktor pembatas teknis, HKm hutan produksi memiliki faktor pembatas kondisi tanaman dan kondisi biofisik, serta HKm hutan lindung dibatasi oleh usaha tani dan konservasi. Berbeda pula dengan faktor pembatas ekonomi HKm hutan produksi yaitu potensi ekonomi HKm, sedangkan faktor pembatas ekonomi HKm hutan lindung adalah dampak ekonomi HKm.	<p>Persamaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meneliti tentang pengelolaan HKm 2. Menjadikan petani hutan HKm sebagai sumber data penelitian. <p>Perbedaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penelitian tersebut sudah pada tahap mengevaluasi pengelolaan HKm. 2. Penelitian tersebut tidak memaparkan bagaimana kolaborasi dan jejaring para aktor dalam pengelolaan HKm, lebih berfokus kepada petani pengelola HKm.
4.	Fitria, Deasy., Dharmawan, Arya Hadi., Prasetyo, Lilik Budi. 2017. <i>Peran Hutan Kemasyarakatan Melalui Inisiatif Karbon Terhadap Nafkah Rumah Tangga Petani di Kabupaten Gunung Kidul Daerah Istimewa</i>	Pengelolaan HKm tidak hanya dapat dilakukan untuk jangka pendek yakni dengan melakukan penebangan kayu jati dengan perencanaan tertentu oleh RKT Sedyo Makmur. Akan tetapi, secara jangka panjang, inisiatif karbon lebih	<p>Persamaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meneliti tentang pengelolaan HKm 2. Meninjau aspek konservasi lingkungan <p>Perbedaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penelitian ini melihat dari sisi ilmu alam 2. Penelitian tersebut tidak

	Yogyakarta. Jurnal Silvikultur Tropika. Volume 08. Nomor 1. Hlm: 35-40.	menguntungkan petani dari segi nominal sekaligus mampu mendukung mitigasi iklim.	memaparkan bagaimana kolaborasi dan jejaring para aktor dalam pengelolaan HKm, lebih berfokus kepada petani pengelola HKm.
5.	Winata, Ni Gusti Ayu Widiarti., Basuki, Prayitno., Karismawan, Putu. 2015. <i>Analisis Determinan Pendapatan Petani Program Hutan Kemasyarakatan (HKm) di Kecamatan Batukliang Utara Kabupaten Lombok Tengah</i> . Jurnal Sosial Ekonomi dan Humaniora. Volume 1. Nomor 1. Hlm 33-41.	Variabel yang berpengaruh terhadap pendapatan petani HKm adalah luas lahan, pengalaman, modal, dan penyuluhan, dengan variabel paling signifikan yaitu variabel modal.	Persamaan: Menjadikan petani hutan HKm sebagai sumber data penelitian. Perbedaan: Berfokus kepada aspek <i>output</i> HKm (pendapatan) bukan pengelolaan HKm.
6.	Firdha, Rahabillah., Herlina., Fariadi, Herri. 2014. <i>Tingkat Partisipasi Kelompok Tani Terhadap Program Hutan Kemasyarakatan (HKm) di Desa Tebat Pulau Kecamatan Bermani Ulu Kabupaten Rejang Lebong</i> . Jurnal Agritepa. Volume 1. Nomor 1. Hlm:63-74.	Tingkat partisipasi kelompok tani di Desa Tebat Pulau dalam sosialisasi, monitoring dan evaluasi adalah “tinggi”, dan pada tingkat partisipasi kelompok dalam perencanaan kerja dan pelaksanaan program HKm adalah “sedang”.	Persamaan: Menjadikan petani hutan HKm sebagai sumber data penelitian yang penting. Perbedaan: Penelitian tersebut tidak memaparkan bagaimana kolaborasi dan jejaring para aktor dalam pengelolaan HKm, lebih berfokus kepada petani pengelola HKm.
7.	Taufiqurrohman. 2014. <i>Implementasi Kebijakan Hutan Kemasyarakatan</i>	Implementasi kebijakannya bersifat <i>bottom up</i> , dimana	Persamaan: 1. Meneliti tentang HKm di Kulon Progo

	<p>(Studi Kasus Hutan Kemasyarakatan di Dusun Kalibiru, Kulon Progo). Tesis. Universitas Gadjah Mada.</p>	<p>masyarakat dan LSM sudah lebih aktif mengawal kebijakan. Faktor penting yang menunjang keberhasilan implementasi kebijakan HKm di Kalibiru adalah unsur sosialisasi yang berjalan dengan baik. Berdasarkan lingkungan kebijakan yang positif, ketersediaan sumber daya yang memadai, dan dari segi ketepatan instrumen kebijakan, kebijakan HKm dianggap mampu menjadi kebijakan yang mendorong kesejahteraan masyarakat.</p>	<p>2. Menjadikan petani hutan HKm sebagai sumber data penelitian.</p> <p>Perbedaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penelitian ini hanya dilakukan di satu titik HKm, bukan keseluruhan HKm di Kulon Progo 2. Penelitian tersebut belum memaparkan bagaimana kolaborasi dan jejaring para aktor dalam pengelolaan HKm.
8.	<p>Williams, Jonah M. 2016. <i>A Systematic Evaluation of Environmental Discrimination with Regard to Sustainability Initiatives in India How Community Based Natural Resource Management Theory Could Offer a Practical Solution to Promoting Equitable Access to Sustainability</i>. Consilience: The Journal of Sustainable Development. Volume 16. Nomor 1. Hlm 64-73.</p>	<p>Jika diterapkan dengan benar, program CBNRM dapat memiliki dampak yang mendalam terhadap keberlanjutan lingkungan suatu kawasan dan akses yang dimiliki semua orang ke sumber daya lokal, terutama mereka yang menghadapi kerugian lingkungan.</p>	<p>Persamaan: Menilai aspek kelestarian lingkungan dan persamaan aksesnya.</p> <p>Perbedaan: Belum memaparkan tentang kolaborasi atau jejaring para aktor dalam CBNRM</p>
9.	<p>Pailer, Sharon., Naidoo, Robin.,</p>	<p>Wilayah CBNRM menunjukkan peningkatan</p>	<p>Persamaan: Menilai CBNRM dari aspek</p>

	Burgess, Neil.D. et al. 2015. <i>Impacts of Community-Based Natural Resource Management on Wealth, Food Security, and Child Health in Tanzania</i> . PLoS One Journal. Volume 10. Nomor 7.	ketahanan pangan yang signifikan dibandingkan dengan wilayah Non-CBRNM. Namun, dari sisi kesejahteraan rumah tangga dan kesehatan anak-anak pada umumnya tidak berbeda jauh. Meskipun demikian, keberhasilan CBNRM menjadi hal yang penting bagi masa depan populasi pedesaan di Tanzania.	kesejahteraan pengelola sumber daya Perbedaan: 1. Penelitian tersebut adalah penelitian di level nasional, bukan level daerah. 2. Hasil penelitiannya bersifat komparatif
10.	Riehl, Brianne., Zerriffi, Hisham., Naidoo, Robin. 2015. <i>Effect of Community-Based Natural Resource Management on Household Welfare in Namibia</i> . PLoS One Journal. Volume 10. Nomor 5.	Program CBNRM Namibia di level rumah tangga memiliki dampak yang positif terhadap pencegahan malaria, efek negatif tentang kehadiran sekolan dan kesejahteraan rumah tangga. Penelitian ini tidak mempertimbangkan masalah keadilan dalam distribusi biaya dan manfaat terkait dengan kegiatan konservasi.	Persamaan: Menilai CBNRM dari aspek kesejahteraan pengelola sumber daya Perbedaan: 1. Penelitian tersebut adalah penelitian di level nasional, bukan level daerah. 2. Tidak membahas mengenai jejaring para <i>stakeholder</i> yang terlibat di dalamnya.

Berdasarkan hasil tinjauan pustaka di atas, **kebaruan penelitian** ini dapat dilihat dari beberapa poin: **Pertama**, penelitian ini berbeda dengan penelitian mengenai CBNRM yang cenderung fokus kepada pencapaian kesejahteraan masyarakat saja dan masih sangat jarang yang membahas mengenai jejaring *stakeholder* yang ada di dalamnya, termasuk kolaborasi yang terjadi. Selain itu penelitian mengenai CBNRM cenderung sering dilakukan di level nasional, bukan regional sebagaimana yang penelitian ini lakukan.

Kedua, berdasarkan hasil tinjauan pustaka, belum ada penelitian yang menggunakan teori CBNRM untuk menguji HKm. Padahal sebagaimana yang telah dijelaskan di atas bahwa makna dan dampak CBNRM relevan dan sejalan dengan maksud, tujuan, dan *output* dari HKm. CBNRM dan HKm berfokus pada dua hal yaitu aksi penyelamatan lingkungan dan menyejahterakan masyarakat lokal dengan cara memberdayakan masyarakat itu sendiri. **Ketiga**, penelitian-penelitian sebelumnya terkait dengan HKm di Kulon Progo umumnya masih terfokus pada HKm Mandiri di wilayah Kalibiru, Kecamatan Kokap. Padahal, HKm yang potensial tidak hanya ada di wilayah tersebut. Masih ada HKm-Hkm lain di Kabupaten Kulon Progo yang telah mendapatkan ijin pengelolaan sebagaimana HKm Mandiri. Maka, penelitian ini tidak hanya meneliti di HKm Mandiri dusun Kalibiru, tetapi meliputi seluruh HKm yang ada di wilayah Kabupaten Kulon Progo.

B. Kerangka Teori

1. *Community-Based Management*/Pengelolaan Berbasis Masyarakat

1.1 Definisi *Community-Based Management*/Pengelolaan Berbasis Masyarakat

Community-Based Management (CBM) atau Pengelolaan Berbasis Masyarakat (PBM) adalah istilah yang digunakan untuk merujuk peran serta masyarakat dalam sebuah pengelolaan (Wahyudin, 2015). Pada hakekatnya, suatu pengelolaan melibatkan berbagai pihak. Namun dalam CBM, yang menjadi titik fokus atau *point of interest* adalah masyarakat.

Namun adapun yang menjabarkan CBM secara lebih terperinci, sebagaimana Nikijuluw (2002) yang menjelaskan CBM sebagai sebuah kegiatan penyerahan tanggung jawab, kesempatan, dan otoritas kepada masyarakat untuk kemudian mengelola sumber dayanya. Nikijuluw membahas tentang tanggung jawab yang diberikan kepada masyarakat dimana tanggung jawab tersebut dapat menjadi pembelajaran tersendiri bagi masyarakat untuk dapat menentukan keputusan bagi kesejahteraan mereka sendiri.

1.2 Implementasi CBM/PBM

Penerapan CBM atau PBM di Indonesia telah memiliki petunjuk teknis tersendiri. LIPI telah membuat COREMAP sebagai pedoman pelaksanaan CBM/PBM di Indonesia. Wahyudin (2015) menjabarkan 10 (sepuluh) langkah implementasi CBM/PBM yang merupakan modifikasi COREMAP LIPI. Langkah-langkah tersebut meliputi:

a. Tahap Persiapan

Tahapan ini harus melaksanakan tiga aktivitas utama yaitu:

- (1) Sosialisasi terkait rencana kegiatan kelembagaan lokal dan masyarakat
- (2) Pemilihan aktor kunci
- (3) Pembentukan atau penguatan kelompok kerja.

b. Tahap Perencanaan

Adapun tujuh ciri perencanaan yang dapat dilaksanakan yaitu:

- (1) Proses perencanaan dimulai dari internal
- (2) Melibatkan masyarakat lokal dalam perencanaan (partisipatif)

- (3) Orientasi pada aksi berdasar kepada tingkat kesiapan
- (4) Memiliki kejelasan tujuan serta luaran
- (5) Kerangka kerja fleksibel untuk pengambilan keputusan
- (6) Terpadu
- (7) Ada proses monitoring dan evaluasi

c. Tahap Persiapan Sosial

Masyarakat harus dipersiapkan untuk:

- (1) Menyampaikan aspirasi, pengetahuan tradisional serta kearifannya dalam penanganan isu-isu lokal
- (2) Memahami keuntungan dan kerugian yang diperoleh dari intervensi yang dianggap sebagai solusi untuk menanggulangi masalah yang ada
- (3) Ikut berperan dalam perencanaan serta implementasi dari rencana tersebut.

d. Tahap Penyadaran Masyarakat

Adapun tiga kunci menyadarkan masyarakat terkait dengan PBM yaitu:

- (1) Menyadarkan terkait nilai-nilai ekologis dan manfaat pengelolaan lestari
- (2) Menyadarkan terkait konservasi
- (3) Menyadarkan mengenai ekonomi lokal yang potensial

e. Tahap Analisa Kebutuhan

Ada tujuh langkah penerapan tahapan ini, yakni:

- (1) PRA dengan partisipasi masyarakat setempat
- (2) Mengidentifikasi situasi dan kondisi di lokasi

- (3) Analisis SWOT
- (4) Mengidentifikasi masalah-masalah yang harus ditindaklanjuti
- (5) Mengidentifikasi kebutuhan yang diinginkan untuk masa depan
- (6) Mengidentifikasi kendala atau penghambat
- (7) Mengidentifikasi strategi untuk mencapai tujuan

f. Pelatihan Keterampilan Dasar

Adapun delapan kegiatan utama yang harus dilakukan, meliputi:

- (1) Pelatihan perencanaan mengelola sumber daya
- (2) Pelatihan keterampilan dasar pengelolaan keuangan
- (3) Pelatihan keterampilan mengenai audit dan pembukuan
- (4) Pelatihan teknis prasarana dan usaha kecil
- (5) Pelatihan tentang keterlibatan masyarakat dalam monev
- (6) Pelatihan dasar observasi sumber daya
- (7) Pelatihan *monitoring* kondisi ekonomi, ekologi, dan sosial
- (8) Orientasi terkait pengawasan dan menjalankan ketentuan yang berkaitan dengan pelestarian sumber daya.

g. Tahap Penyusunan Rencana Pengelolaan Sumberdaya Terpadu Dan Berkelanjutan

Adapun langkah-langkah menyusun rencana pengelolaan sumber daya, yakni:

- (1) Melakukan pengkajian terhadap kendala, masalah, dan strategi
- (2) Menetapkan tujuan dan sasaran
- (3) Membantu pemetaan yang dilakukan masyarakat

(4) Menelaah hak guna atas sumber daya

(5) Memberi ruang untuk keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan monitoring pelaksanaan

h. Tahap Pengembangan Ekonomi Lokal

Tahapan ini terdiri dari beberapa langkah, yaitu:

(1) Penentuan jenis usaha

(2) Menindaklanjutinya dengan studi kelayakan

(3) Pembentukan/pemberdayaan kelompok usaha mikro

(4) Pelatihan manajemen dan teknis dalam usaha

(5) Mengusahakan adanya penyediaan dana awal, kajian pengembangan koperasi, dan akses yang lebih luas terhadap sumber dana

i. Tahap Pengembangan Fasilitas Sosial

Tahap ini terdiri atas dua kegiatan pokok yang meliputi:

(1) Membuat analisis kebutuhan fasilitas dalam membantu ekonomi lokal

(2) Peningkatan keterampilan lembaga yang bertanggung jawab dalam upaya menyelamatkan sumber daya dan pembangunan fasilitas.

j. Tahap Pendanaan

Pemerintah menjadi aktor penting yang diharapkan mampu memberikan pembiayaan alternatif sebagai dana awal dan implementasi dari CBM/PBM. Sedangkan untuk selanjutnya, pelaksanaan PBM semestinya bertumpu kepada dana swadaya masyarakat ketika kegiatan ekonomi telah memberikan keuntungan.

2. *Community-Based Natural Resource Management (CBNRM)*

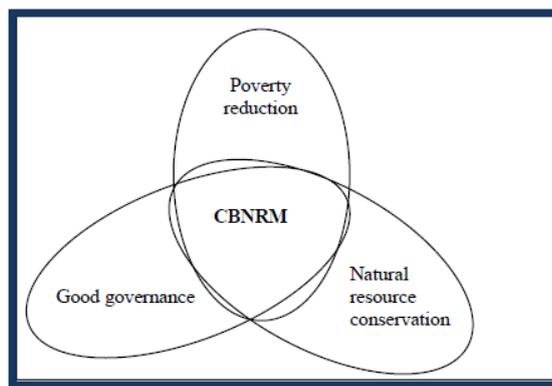
2.1 Definisi *Community-Based Natural Resource Management (CBNRM)*

CBNRM sebagai sebuah alternatif untuk strategi *top-down* dalam manajemen sumber daya (Delgado-Serrano et.al, 2015). CBNRM adalah pengelolaan kolektif terhadap ekosistem untuk meningkatkan kesejahteraan manusia (Delgado-Serrano, 2016). *Community-Based Natural Resource Management (CBNRM)* merupakan sebuah mekanisme untuk mencapai tujuan lingkungan dan ekonomi sosial, serta menyeimbangkan eksploitasi dan konservasi komponen bernilai dari ekosistem (Armitage, 2005). Secara lebih lanjut, Armitage (2005) juga menjelaskan bahwa CBNRM adalah sebuah bentuk upaya untuk dapat mengurai hasil pengelolaan sumber daya alam dengan melibatkan masyarakat secara penuh, institusi, praktik adat, dan pengetahuan sistematis dalam pengelolaan, pengaturan, dan penegakan hukum.

Sedangkan Child dan Lyman (2005) melihat CBNRM dari sisi yang berbeda, dimana keduanya mendefinisikan CBNRM sebagai sebuah proses dimana para *landholder* (pemilik lahan) mendapatkan akses dan menggunakan haknya atas sumber daya alam, adanya perencanaan kolaboratif dan transparan serta berpartisipasi dalam pengelolaan sumber daya alam, serta mendapat benefit baik finansial atau non-finansial atas keterlibatan mereka. Definisi ini menekankan pada aspek akses dan keterlibatan aktor di dalamnya. Sedangkan Armitage menjabarkan CBNRM secara umum dan menyeluruh, termasuk pada aspek pengetahuan dalam pengelolaan.

2.2 Tujuan *Community-Based Natural Resource Management* (CBNRM)

CBNRM memiliki tujuan untuk menciptakan insentif dan kondisi yang sesuai untuk sebuah kelompok yang teridentifikasi sebagai pengguna sumber daya dalam area yang telah ditentukan untuk penggunaan sumber daya alam secara berkelanjutan (USAID, 2013). Sedangkan DANIDA (2007) menegaskan bahwa tujuan utama dari CBNRM meliputi tiga hal yaitu: pengentasan kemiskinan, konservasi sumber daya alam, dan *Good Governance*. Tiga tujuan tersebut dapat dilihat pada ilustrasi di bawah ini.

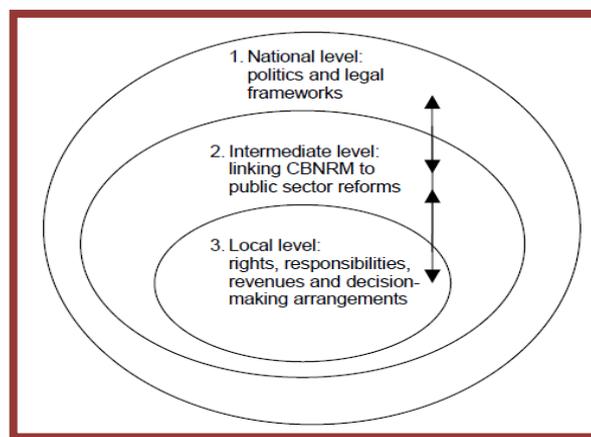


Gambar 2.1
Tujuan *Community-Based Natural Resource Management* (CBNRM)
(Sumber: DANIDA, 2007)

Tiga tujuan CBNRM saling berkaitan satu dengan yang lain sebagaimana yang diilustrasikan pada gambar 2.1 di atas. Pengentasan kemiskinan berhubungan erat dengan konservasi sumber daya alam, hal ini dikarenakan orang-orang miskin terutama di negara berkembang bergantung kepada hasil sumber daya alam untuk penghidupan mereka. Maka, penting bagi suatu negara untuk melestarikan sumber daya alamnya melalui pengelolaan yang

berkelanjutan. Keterlibatan masyarakat miskin dalam pengelolaan sumber daya perlu dicapai dengan desentralisasi kewenangan atas sumber daya tersebut.

Adanya desentralisasi tersebut mengharuskan terjadinya *Good Governance* di dalam pengelolaan sumber daya alam. Desentralisasi dalam CBNRM dilaksanakan dengan tingkatan tertentu. Penyerahan wewenang terkait dengan pengelolaan sumber daya dilakukan dengan hierarki dalam tiga tingkatan. Tiga tingkatan tersebut dapat dilihat dalam gambar di bawah ini.



Gambar 2.2
Tiga level *Community-Based Natural Resource Management*
(Sumber: DANIDA, 2007)

2.3 Variabel dalam *Community-Based Natural Resource Management* (CBNRM)

Terdapat enam variabel yang dapat digunakan untuk menilai tiga aspek dalam CBNRM, yaitu aspek ekonomi, aspek sosial, dan aspek lingkungan (Keller et al. 2000). Enam variabel yang dimaksud meliputi:

a. *Equity* (Keadilan)

Variabel ini berkaitan dengan distribusi dan alokasi dari keuntungan sosial ekonomi dan sumber daya.

b. *Empowerment* (Pemberdayaan)

Berhubungan dengan distribusi kekuasaan dan status, terkhusus diantara masyarakat lokal, termasuk otoritas yang dilimpahkan dari pemerintah pusat kepada masyarakat dan institusi lokal sebagaimana partisipasi di dalam pembuatan keputusan, pembagian kekuasaan, dan/atau demokratisasi.

c. *Conflict Resolution* (Resolusi Konflik)

Pengendalian dan penyelesaian konflik dan sengketa mengenai sumber daya diantara masyarakat lokal, diantara entitas dan kepentingan lokal, negara, serta kepentingan nasional.

d. *Knowledge and awareness* (Pengetahuan dan Kesadaran)

Variabel tentang pertimbangan, penggabungan, dan produksi pengetahuan ekologi tradisional dan modern dalam mengelola sumber daya alam

e. *Biodiversity protection* (Perlindungan keanekaragaman)

Konservasi dan perlindungan keanekaragaman hayati dan habitat terkait, termasuk pelestarian dan pemulihan spesies langka, terancam, atau unggulan, ataupun populasi yang terancam keberlangsungannya.

f. *Sustainable utilization* (Pemanfaatan berkelanjutan)

Pemanfaatan konsumtif dan non konsumtif sumber daya secara alami, untuk menjaga ketersediaan sumber daya jangka panjang ini dengan cara yang tidak berkurang untuk generasi sekarang dan masa depan.

3. *Social Network Analysis/SNA (Analisa Jejaring Sosial)*

1.1 Definisi SNA

SNA menganalisa jejaring sosial dalam satu perangkat simpul (misalnya individu-individu atau organisasi-organisasi) dan satu set ikatan diantara simpul-simpul tersebut (Fliervoet et.al, 2016). Sedangkan Tsvetovat dan Kouznetsov (2011) menyatakan bahwa SNA merupakan sebuah studi yang mempelajari mengenai hubungan manusia dengan menggunakan teori graf. SNA akan menggambarkan pola-pola tertentu. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Zaphiris dan Pfeil (2007) bahwa SNA digunakan untuk mempelajari pola jaringan ide, organisasi, dan orang-orang yang saling terkait melalui berbagai macam cara dalam suatu lingkup tertentu. Secara lebih lanjut, teknik SNA akan menghasilkan matriks yang meliputi pertukaran informasi antar aktor, dengan nilai "1" yang menunjukkan pertukaran informasi yang signifikan dan nilai "0" untuk menunjukkan tidak adanya pertukaran informasi yang signifikan (Purnomo, et.al 2017).

1.2 Konsep Dasar dalam SNA

Cheolitis (2010) menjelaskan bahwa ada empat konsep dasar dalam SNA.

Konsep-konsep tersebut terdiri atas:

a. *Networks*

Konsep *network* yang dimaksud adalah mengenai representasi gambaran bermacam macam jejaring sosial.

b. *Tie Strength*

Konsep mengenai kekuatan ties (ikatan/hubungan) dalam jejaring yang ada.

c. *Key Player*

Konsep ini adalah untuk mengetahui siapa yang menjadi aktor utama atau pusat dari jejaring.

d. *Cohesion*

Konsep yang dimaksud adalah untuk mengukur atau menilai seluruh struktur jaringan.

1.3 *Metric* dalam SNA

Ada beberapa *metric* yang digunakan untuk mengetahui key actor atau *key player* di dalam pengukuran SNA. Setiap *metric* ini akan merepresentasikan data-data tertentu yang tergambar melalui nodes. Beberapa *metric* tersebut antara lain:

a. *Degree Centrality*

Degree Centrality bertujuan untuk menilai *node* pusat yang menyebarkan informasi dan mampu mempengaruhi aktor lain di lingkungan tersebut (Cheliotis, 2010).

b. *Betweenness Centrality*

Menunjukkan *node* yang cenderung berada dalam jalur komunikasi *nodes* lain (Oktora dan Alamsyah, 2014). *Metric* ini menggambarkan siapa aktor yang menjadi penghubung di dalam jaringan.

c. *Closeness Centrality*

Rerata seluruh jalur terpendek dari satu node untuk semua node yang lain dalam jejaring (Cheliotis, 2010). *Closeness Centrality* digunakan untuk menilai kecepatan persebaran informasi (Syawiluna et.al 2017).

d. *Eigenvector Centrality*

Metric ini digunakan untuk menentukan *node* mana yang terhubung dengan node yang paling terhubung (Cheolitis, 2010).

4. Hutan Kemasyarakatan

4.1 Definisi Hutan Kemasyarakatan

Community Forestry (CF) di Indonesia memiliki beberapa macam bentuk, antara lain: *Collaborative Forest Management* atau kemitraan, *Community Forest* atau Hutan Kemasyarakatan/HKm, *Village Forest* atau Hutan Desa, *Community Plantation Forest* atau Hutan Tanaman Rakyat, dan *Customary Forest* atau Hutan Adat (Kaskoyo et al. 2014). Hutan Kemasyarakatan didefinisikan sebagai sebuah program yang dibuat oleh Pemerintah Indonesia dengan tujuan memberdayakan masyarakat setempat dengan menjamin hak mereka untuk menggunakan hutan lindung (Arifin, 2006). Bahkan, skema HKm yang kolaboratif dinilai mampu menjadi solusi atas konflik dalam pengelolaan sumber daya alam (Abdurrahim, 2015).

HKm didirikan oleh pemerintah juga untuk mempraktekkan pengelolaan hutan lestari atau berkelanjutan, untuk kemudian dapat mempertahankan fungsi

hutan dan lingkungan, serta meningkatkan kesejahteraan sosial (Pender et al. 2008). Definisi-definisi di atas diperkuat oleh Prasetyo (2013) yang menyatakan bahwa Hutan Kemasyarakatan (HKm) adalah kebijakan pemerintah untuk menekan laju deforestasi dengan melibatkan masyarakat.

Definisi HKm menurut Wibowo (2013) bahwa kebijakan tentang CBFM di Indonesia berupaya untuk mendorong perkembangan ekonomi melalui usaha berbasis hutan untuk memperkaya penghidupan wilayah pedesaan dan untuk mendorong sebuah perubahan menuju manajemen hutan berkelanjutan untuk mengurangi deforestasi. Berdasarkan berbagai definisi di atas, maka dapat diketahui bahwa HKm berpusat kepada peran serta masyarakat untuk mencapai dua hal yaitu kesejahteraan dan kelestarian hutan dan/atau lingkungan.

4.2 Tujuan Hutan Kemasyarakatan

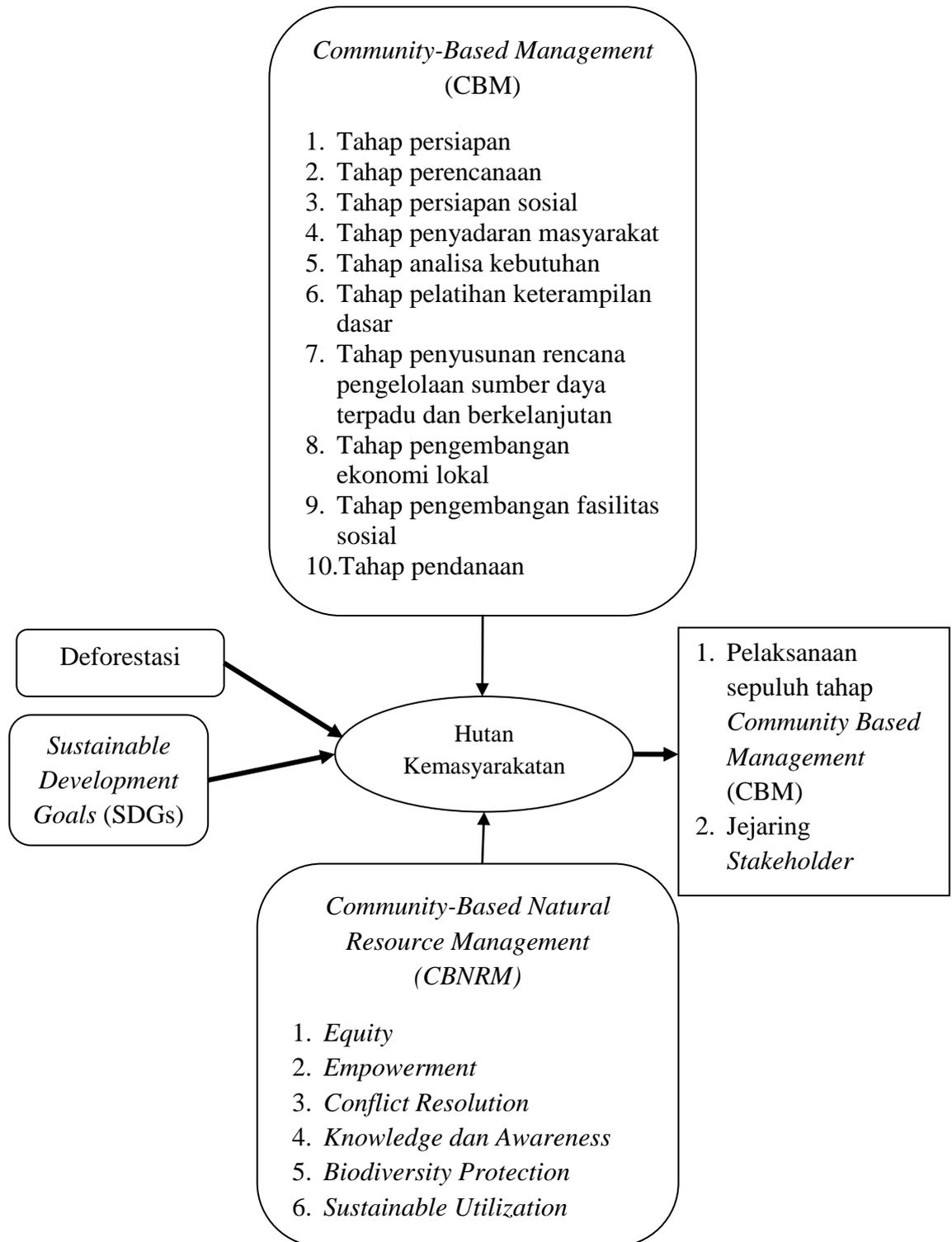
Tujuan berdirinya Hutan Kemasyarakatan (HKm) secara teoritis adalah untuk mencapai dua hal (Larson dan Soto, 2008), yaitu: meningkatkan penghidupan masyarakat setempat dan memperbaiki kondisi hutan. Tujuan HKm di atas selaras dengan regulasi yang mengatur tentang HKm di Indonesia, yakni Peraturan Menteri Kehutanan (Permenhut) Nomor 88 Tahun 2014 tentang Hutan Kemasyarakatan. Permenhut tersebut menegaskan tujuan pemerintah Indonesia mengadakan Hutan Kemasyarakatan. HKm didirikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar dengan pengelolaan sumber daya secara adil, optimal, dan berkelanjutan. Permenhut Nomor 88 Tahun 2014 menekankan bahwa pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya harus tetap menjaga kelestarian

lingkungan hidup dan juga fungsi hutan. Tujuan HKM yang diamanatkan oleh Permenhut Nomor 88 Tahun 2014, diperjelas melalui gambar di bawah ini.



Bagan 2.1
Poin-poin Tujuan Pembentukan Hutan Kemasyarakatan
(Diolah dari sumber: Permenhut Nomor 88 tahun 2014)

C. Kerangka Pikir



Bagan 2.2
Kerangka Pikir Penelitian

D. Definisi Konseptual

1. *Community-Based Management (CBM)*

Community-Based Management adalah istilah untuk menjelaskan sebuah kegiatan pengelolaan tertentu dimana dalam kegiatan tersebut berpusat kepada masyarakat melalui penyerahan tanggung jawab, kesempatan, dan wewenang untuk mengelola sumber daya.

2. *Community-Based Natural Resource Management (CBNRM)*

Community-Based Natural Resource Management ialah sebuah proses pengelolaan sumber daya alam dengan melibatkan masyarakat secara penuh dan pihak-pihak lain secara kolaboratif dalam pengelolaan, pengaturan, dan penegakan hukum untuk mencapai tujuan ekonomi sosial, lingkungan, dan konservasi ekosistem.

3. Hutan Kemasyarakatan (HKm)

Hutan Kemasyarakatan adalah kebijakan pemerintah untuk memberdayakan masyarakat melalui pemanfaatan hutan secara berkelanjutan, dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat dan kelestarian hutan dan/atau lingkungan.

E. Definisi Operasional

1. Definisi Operasional untuk Pengumpulan Data Kuantitatif

Penelitian ini akan menggunakan variabel yang bersumber dari teori CBNRM yang dikemukakan Keller et.al (2000). Variabel yang dimaksud adalah variabel yang dinilai mampu menjelaskan aspek-aspek dalam CBNRM. Variabel-

variabel yang digunakan dalam penelitian ini diperinci ke dalam beberapa indikator dan parameter. Berikut ini adalah variabel, indikator, dan parameter dalam penelitian ini:

Tabel 2.1
Variabel, Indikator, dan Parameter untuk Kuesioner

No	Variabel	Indikator	Parameter
1.	<i>Equity</i> (Keadilan)	1.1 Alokasi dan Distribusi Sosial	Kepemilikan sistem/aturan pembagian peran
			Penerimaan masukan dari pihak lain terkait pembagian peran
			Kesempatan yang sama dalam pengelolaan hkm
		1.2 Alokasi dan Distribusi Ekonomi	Kepemilikan sistem/aturan pembagian hasil
			Penerimaan masukan dari pihak lain terkait pembagian hasil
			Pembagian keuntungan secara adil
2.	<i>Empowerment</i> (Pemberdayaan)	2.1 Pelimpahan Wewenang	Pelaksanaan pelimpahan wewenang dari pusat
			Kerjasama dengan pihak lain
			Peraturan terkait kerjasama
		2.2 Pembuatan Keputusan	Kemampuan membuat keputusan
			Penerimaan masukan dari pihak lain dalam pembuatan keputusan
			Pembahasan ide dan masalah
		2.3 Pembagian Kekuasaan	Pembagian kekuasaan sesuai konsensus
			Menerima masukan terkait dengan pembagian kekuasaan
			Pembagian kekuasaan dengan memperhatikan mitra
3.	<i>Conflict Resolution</i> (Resolusi Konflik)	3.1 Pengendalian Konflik	Profesionalitas di tengah konflik
			Perlindungan di tengah konflik
			Keadilan dalam pengendalian konflik
		3.2 Penyelesaian Konflik	Mediator dalam konflik
			Netralitas dalam penyelesaian konflik

			Penyelesaian konflik secara adil
4.	<i>Knowledge and Awareness</i> (Pengetahuan dan Kesadaran)	4.1 Pengetahuan dan Kesadaran Tentang Ekologi Tradisional dan Modern	Pengetahuan pengelolaan secara tradisional dan modern
			Pertukaran informasi terkait pengelolaan
			Penggabungan pengetahuan tradisional dan modern
		4.2 Inovasi	Pencarian inovasi
			Penerapan inovasi setelah pengkajian informasi
			Penggunaan cara tradisional dan modern dalam pengelolaan
5.	<i>Biodiversity Protection</i> (Perlindungan Keanekaragaman)	5.1 Konservasi	Usaha konservasi
			Pihak yang mendampingi usaha konservasi
			Sarana sosialisasi konservasi
		5.2 Pelestarian Lingkungan	Kepemilikan standar pelestarian lingkungan
			Bantuan pihak lain dalam pelestarian
			Bermitra dengan pihak lain dalam pencarian ide pelestarian
6.	<i>Sustainable Utilization</i> (Pemanfaatan Berkelanjutan)	6.1 Pemanfaatan Konsumtif Alami	Kepemilikan prosedur pemanfaatan konsumtif
			Kepastian penerapan prosedur pemanfaatan konsumtif
			Monev penerapan prosedur pemanfaatan konsumtif
		6.2 Pemanfaatan non-konsumtif alami	Kepemilikan prosedur pemanfaatan non
			Kepastian penerapan prosedur pemanfaatan non
			Monev penerapan prosedur pemanfaatan non

Variabel, indikator, dan parameter di atas digunakan sebagai dasar instrumen pertanyaan dalam kuesioner (*kuesioner terlampir*). Kuesioner menggunakan pengukuran dalam skala 1-5 untuk setiap jawaban dari keseluruhan

pertanyaan yang diberikan. Berikut ini adalah rincian keterangan untuk setiap skor:

Tabel 2.2
Penilaian Jawaban Kuesioner

SKOR	KETERANGAN
1	Tidak Pernah
2	Jarang
3	Kadang
4	Sering
5	Selalu

Total hasil skor untuk setiap responden dimasukkan ke dalam *software* NodeXL untuk mendapatkan data *Social Network Analysis* (SNA) yang ada di dalam pengelolaan HKM di Kabupaten Kulon Progo. Data SNA yang dihasilkan oleh NodeXL tersebut menggambarkan beberapa hal, sebagaimana yang dijelaskan dalam tabel berikut.

Tabel 2.3
Kegunaan Data SNA

No.	Instrumen NodeXL	Kegunaan
1.	<i>Degree</i>	Untuk mengetahui aktor kunci (ranking teratas dari semua <i>stakeholder</i>) dalam pengelolaan HKM di Kulon Progo.
2.	<i>Betweenness</i>	Untuk mengetahui aktor penghubung antar <i>stakeholder</i> dalam pengelolaan HKM di Kulon Progo.
3.	<i>Closeness</i>	Untuk mengetahui kedekatan hubungan antar aktor/ <i>stakeholder</i> dalam pengelolaan HKM di Kulon Progo.
4.	<i>Eigenvector</i>	Untuk mengetahui aktor penting yang terhubung dengan aktor kunci (aktor yang paling terhubung) di dalam pengelolaan HKM di Kulon Progo

2. Definisi Operasional untuk Data Kualitatif

Data kualitatif terkait dengan CBNRM Hutan Kemasyarakatan di wilayah Kabupaten Kulon Progo diperoleh dengan menggunakan teknik wawancara *in-*

depth dengan pedoman teori CBM dari *Coremap* LIPI yang diadaptasi oleh Wahyudin (2015). Beberapa variabel dan indikatornya antara lain:

Tabel 2.4
Variabel dan Indikator Untuk Wawancara

No.	Variabel	Indikator
1.	Persiapan	1.1 Sosialisasi Terkait Rencana Kegiatan Kelembagaan Lokal dan Masyarakat
		1.2 Pemilihan aktor kunci
		1.3 Pembentukan kelompok
2.	Perencanaan	2.1 Perencanaan internal kelompok
		2.2 Partisipasi masyarakat
		2.3 Adanya Kejelasan Tujuan dan Luaran
3.	Persiapan Sosial	3.1 Pemahaman persepsi masyarakat
		3.2 Pemahaman keuntungan dan kerugian dari keterlibatan dengan HKm
		3.3 Mempersiapkan Masyarakat dalam Implementasi
4.	Penyadaran Masyarakat	4.1 Tentang nilai dan manfaat pengelolaan lestari dan konservasi
		4.2 Tentang potensi ekonomi
5.	Analisa Kebutuhan	5.1 Identifikasi situasi dan kondisi lokasi HKm
		5.2 Identifikasi Kendala dan Merumuskan Strategi
6.	Pelatihan Keterampilan Dasar	6.1 Pelatihan perencanaan pengelolaan dan pelaporan
		6.3 Pelatihan teknis
		6.4 Pelatihan kelembagaan
7.	Penyusunan Rencana Pengelolaan Sumber Daya Terpadu dan Berkelanjutan	7.1 Pengkajian terhadap kendala, masalah, dan strategi
		7.2 Penetapan tujuan dan sasaran
8.	Pengembangan ekonomi lokal	8.1 Pelatihan manajemen dan teknis usaha
		8.2 Pembentukan koperasi/kelompok usaha mikro
9.	Pengembangan Fasilitas Sosial	9.1 Identifikasi kebutuhan fasilitas untuk membantu ekonomi lokal
		9.2 Penentuan pihak yang bertanggungjawab atas fasilitas
10.	Pendanaan	10.1 Pendanaan dari pemerintah
		10.2 Pendanaan swadaya masyarakat

